

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
LAMPUNG TAHUN 2013-2017 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh :**

**Nama : Intan Marlia  
NPM : 1351020096  
Jurusan : Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441/2019 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah propinsi Lampung dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan populasi pemerintahan propinsi Lampung tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*.

Hasil pengujian menunjukkan: rasio kemandirian dirata-rata kemampuan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung sangat tinggi dan pola hubungannya termasuk pola hubungan delegatif di mana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, rasio efektivitas pemerintah daerah Provinsi Lampung cukup efektif, rasio efisiensi Kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Lampung masih kurang efisien, karena jumlah realisasi pendapatan daerah yang diperoleh masih lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan realisasi belanja daerah, rasio belanja rutin rata-rata rasio nya 44,8%, hal ini menyimpulkan bahwa pemerintah daerah provinsi Lampung lebih banyak menggunakan alokasi dana untuk membangun sarana dan prasarana dalam menunjang perekonomian masyarakat, rasio belanja pembangunan Kabupaten di Lampung 55,7% yang berarti bahwa pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah provinsi Lampung lebih besar jika di bandingkan dengan belanja rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Lampung, rasio pertumbuhan sekitar 10,74%. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah Provinsi Lampung belum optimal dalam mengelola keuangan daerahnya.

Kata kunci: kemandirian, efektivitas, efisiensi, belanja rutin, belanja pertumbuhan, pertumbuhan, kinerja keuangan





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara

Nama : Intan Marlia  
NPM : 1351020096  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Bisnis dan Islam  
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Tahun 2013-2017 dalam Prespektif Ekonomi Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas FEBI UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**A. Zuliansyah, S.Si., M.M**  
**NIP. 198302222009121003**

**Pembimbing II**

**Agus Kurniawan, M.S.Ak**  
**NIP.**

**Mengetahui**  
**Ketua jurusan Perbankan Syariah**

**Erike Anggraini, M.E., Sy. D.B.A**  
**NIP. 198208082011012**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG TAHUN 2013-2017 DALAM PERSPEKTIF ISLAM** disusun oleh **Intan Marlia, NPM.1351020096**, Program Study :Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : **Dr. R. Masykur, M.Pd**

Sekretaris : **Dedi Satriawan, M.Pd**

Penguji I : **Any Eliza, S.E., M.Ak**

Penguji II : **A. Zuliansyah, S.Si, M**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**  
**NIP. 198008012003121001**



#### MOTTO

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا  
يُوقِنُونَ ٢٤

Artinya : “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami”. (AS-Sajdah:24)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1996 di desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran. Putri ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Halimuddin dan Ibu Sanauyah Berikut riwayat pendidikan penulis :

1. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 1 Penengahan.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Pardasuka.
3. Melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 1 Keedondong.
4. Dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung, Febuari 202

Penulis

Intan Marlia

## KATA PENGANTAR

*Bissmillahirohmanirrohim*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, petunjuk dan kehendak-Nya sehinggaskripsi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Tahun 2013-2017 Dalam Perspektif Islam” dapat diselesaikan. Tidak lupa pula penulis panjatkan salawat dan tazlim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan teladan bagi kita semua.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Srata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu perbankan syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalam nya. Secara rinci penulis menyampaikan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Erike Anggraini, M.E., Sy. D.B.A selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senatiasa tanggap dalam kesulitan-kesulitan mahasiswa.



4. Bapak A. Zuliansyah, S.Si, M selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, membimbing, mengarahkan, dan motivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Agus Kurniawan, M.S.,Ak selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, membimbing, mengarahkan, dan motivasi hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakutas Universitas dan FEBI yang telah memberikan informasi, data referensi dan lain-lain.
8. Karyawan dan Staf Perpustakaan Daerah Bandar Lampung yang telah memberikan data referensi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khusus nya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 05 febuari 2020  
Penulis,

Intan Marlia



## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang .....	4
D. Identifikasi Masalah.....	10
E. Batasan Masalah .....	11
F. Rumusan Masalah.....	11
G. Tujuan Penelitian .....	12
H. Manfaat Penelitian .....	12

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori .....	15
1. Keuangan Daerah .....	15
2. Akuntansi Keuangan Daerah .....	21
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	25
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	27
5. Analisis Rasio Keuangan .....	30
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	34
C. Kerangka Berfikir .....	36
D. Hipotesis .....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Wilayah Penelitian.....	43
B. Jenis Penelitian.....	43
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .....	43
D. Data dan Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Variabel Penelitian.....	45
G. Definisi Operasional Variabel.....	46
H. Teknik Analisis Data.....	48

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah.....	50
B. Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	52
C. Pembahasan Hasil Analisis Data.....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Keterbatasan Penelitian .....	84
C. Saran-saran .....	85

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini, penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas,. Adapun judul skripsi ini adalah **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Tahun 2013-2017.**

Untuk itu perlu diuraikan pengeertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

##### **1. Analisis**

Dalam kamus besar bahasa indonesia analisis bisa diartikan sebagai: penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-mussabab, duduk perkaranya, dsb). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. Pemecahan persoalan yang dimulia dengan dugaan akan kebenarannya. Analisis merupakan “membaca” teks, yang melikalisasikan tanda-tanda yang

menempatkan tanda-tanda itu dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang disampaikan. Dengan kata lain analisis adalah penyelidikan, penguraian, penjabaran, pemecahan terhadap suatu peristiwa.<sup>1</sup>

## 2. Kinerja

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja pada hakikatnya merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya, sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan untuk pekerjaan itu.<sup>2</sup>

## 3. Keuangan

Menurut Sundjaja dan Barlian pengertian keuangan yaitu: "Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang dimana diantara individu maupun antarbisnis dan pemerintah".<sup>3</sup>

Keuangan merupakan faktor yang paling mendominasi dalam pengukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Keuangan daerah juga menjadi penentu bentuk dan ragam yang akan dilakukan pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Analisis" <http://kbbi.web.id/analisis>, diakses tanggal (10 Desember 2018)

<sup>2</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>3</sup>Sundjaja, Ridwan S dan Barlian Inge, 2002, *Manajemen Keuangan 2*, Jakarta : Literata lintas Media




dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi adalah menganalisis kinerja keuangan pemerintahan kabupaten/kota se-Lampung dengan rasio-rasio seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan untuk periode tahun 2013-2017.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Secara Objektif**



Secara teori kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu di raih oleh perusahaan perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang kinerja keuangan pemerintah propinsi Lampung dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan tahun 2013-2017.

- b. Bagi penulis banyak referensi pendukung dari skripsi yang diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya, selain itu juga data yang dihasilkan dari lapangan.

### **C. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini berada pada masa transisi dari era persaingan global menuju ke era persaingan informasi. Salah satu tolak ukur dari keberhasilan suatu negara ialah bagaimana menciptakan tata kelola yang baik dalam lingkungan pemerintahannya. Meskipun pemerintahan atau organisasi publik saat ini juga menghadapi tantangan besar dengan adanya kebijakan otonomi daerah karena salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat.

Undang-Undang tersebut merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah mulai dari erencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka



mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Kedua undang-undang tersebut mengandung penekanan bahwa adanya proses yang lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat akan terlayani dengan baik oleh pemerintah. Selain itu menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan.

Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab merupakan pilar dari sistem otonomi di Indonesia. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.<sup>4</sup>

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal tetapi juga perlu adanya dukungan dari kemampuan keuangan yang memadai. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

---

<sup>4</sup>Haryanto dkk, "Akuntansi Sektor Publik". Edisi Pertama. (Universitas Diponegoro, 2007), h.18

Perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan. Tujuan pelaporan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai pihak yang bertugas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dalam menjalankan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh Pamudji dan Kabo (1998) dalam Susantih dan Saftiana (2007), menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini disusun berdasarkan asas perimbangan *incremental budget* dimana masing-masing komponen pendapatan dan

belanja besarnya dihitung dengan meningkatkan sejumlah prosesntase tertentu dan mengabaikan rasio keuangan dalam APBD.<sup>5</sup>

Dalam *concept statements* no. 2, membagi pengukuran kinerja dalam tiga kategori indicator, yaitu: (1) indicator pengukuran *service efforts*; (2) indicator pengukuran *service accomplishment*; dan (3) indicator yang menghubungkan antara *efforts* dengan *accomplishment* diartikan sebagai prestasi dari program tertentu. Disampaikan juga penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja. Pengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan oleh pemerintah, apakah sudah memenuhi tujuan dan efek yang ditimbulkan terhadap penerima layanan tersebut.<sup>6</sup>

Parker (1996) dalam Suradjito (2000) Menyebutkan terdapat lima manfaat dengan adanya pengukuran kinerja yaitu: (1) pengukuran kinerja mampu meningkatkan mutu pengambilan keputusan; (2) pengukuran kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas internal; (3) pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas public; (4) pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan; (5) pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.

Dharmawati dan Irmadariyani (2016) melakukan analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten

---

<sup>5</sup>Mardiasmo.(2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

<sup>6</sup>Hendriyadi, S."Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Antara Tahun 2008-2009.(Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang,2011).



Banyuwangi menggunakan rasio kemandirian dan rasio efektivitas. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa rasio kemandirian pemerintah daerah Banyuwangi cukup rendah. Dikarenakan pemerintah daerah belum efektif dalam melaksanakan kemandirian daerahnya. Meskipun begitu, rasio efektivitas pemerintah Banyuwangi tinggi, terbukti dengan sudah mencapainya PAD melebihi batas yang ditargetkan pemerintah daerah.

Dewi (2015) melakukan penelitian dengan hasil bahwa tingkat kemandirian di Bukittinggi masih rendah, karena peran pemerintah pusat lebih dominan. Pada rasio efektivitas kurang efektif, dan dapat dikatakan kurang mendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dari tingkat efisiensinya, telah mampu menjalankan tugas secara efisien terbukti dengan perubahan yang terjadi setiap tahunnya, namun dari segi ketergantungan, masih sangat tinggi. Pada rasiopertumbuhan menggambarkan tergolong mampu dan meningkatkan keberhasilan dari setiap periode dalam menumbuhkan pendapatan asli daerah.

Wakhyudi dan Tarunasari (2013) melakukan penelitian untuk mengukur Kinerja keuangan pemerintah daerah melalui rasio keuangan, antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini rasio kemandirian dinyatakan rendah karena pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Sedangkan untuk rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan mengalami peningkatan terbukti dengan

pemerintah daerah mulai adanya pembangunan sarana dan prasana. Sementara itu rasio efektivitas dan efisiensinya dinyatakan stabil.

Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013) melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah se-Indonesia dengan menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tingkat perbedaan kinerja keuangan pemerintah provinsi se-Indonesia dilihat dari rasio kemandirian, efektivitas, dan aktivitas. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio efisiensi dan pertumbuhan.

Magdalena dan Kurniawan (2013) melakukan penelitian mengenai indikator kinerja keuangan pemerintah provinsi se-Indonesia dengan menggunakan rasio keuangan berupa rasio kemandirian dan rasio efektivitas dan keserasian kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia

Penelitian ini dilakukan berdasarkan *research gap* adanya perbedaan terkait hasil penelitiandari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013) menunjukkan hasil bahwa terdapat tingkat perbedaan kinerja keuangan se-Indonesia dilihat dari rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi. Magdalena dan Kurniawan (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari ketiga rasio tersebut.

Selain itu, terdapat gap dalam penelitian Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013) yang menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio efisiensi dan pertumbuhan. Berdasarkan *research gap* yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Tahun 2013-2017”.

#### **D. Identifikasi Masalah**

Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

Tujuan analisis laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan atau pemerintah daerah yang berguna bagi para penggunanya untuk membuat keputusan. Untuk memahami informasi laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan. Salah satu analisis untuk membuat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Menurut Riyanto rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan financial suatu perusahaan.



#### **E. Batasan Masalah**

Batasan dalam penelitian dilakukan untuk mempermudah pemecahan masalah yaitu:

- 1 Laporan keuangan APBD yang diteliti adalah Laporan Keuangan Provinsi Lampung tahun 2013-2017.
- 2 Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur hanya dengan menggunakan rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.
- 3 Obyek yang diteliti adalah Propinsi Lampung untuk tahun 2013 - 2017.

#### **F. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Daerah Propinsi Lampung dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan tahun 2013-2017?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Daerah Propinsi Lampung dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan tahun 2013-2017 dalam perspektif ekonomi islam?

## **G. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini :

1. menganalisis kinerja keuangan pemerintah Propinsi Lampung berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan dari tahun 2013-2017.
2. menganalisis kinerja keuangan pemerintah Propinsi Lampung berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan dari tahun 2013-2017 dalam perspektif ekonomi islam.

## **H. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Akademisi

Menambah wawasan akademisi mengenai rasio-rasio yang digunakan

dalam menganalisis laporan keuangan terhadap APBD untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas pemerintah dalam upaya pengalokasian dan pemerolehan sumber pendapatan daerah sehingga masyarakat mampu menilai dan menyikapi permasalahan daerah secara objektif.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

##### **1. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kinerja Keuangan**

Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010 : 112).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986 : 199).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang undangan selama periode anggaran.

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah saat ini, akan perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2000:

3)



- 1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat (DPRD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan daerah.
- 2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
- 3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta dari partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti: DPRD, Kepala Daerah, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
- 4) Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan
- 5) Keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas.
- 6) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
- 7) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
- 8) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang-barang daerah yang lebih profesional.
- 9) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating

kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.

10) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan,

peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.

11) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan

informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah daerah terhadap.

12) Penyebarluasan informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

## 2. Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut *American Accounting Assosiation* (1996) dalam Hendrariyadi (2011)<sup>7</sup>:

“Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga melingkupi penganalisisan laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut.”

---

<sup>7</sup>Hendrariyadi, S.2011. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Antara Tahun 2008-2009*. (Skripsi.Universitas Diponegoro Semarang)

Definisi tersebut diketahui bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kualitatif, terutama yang berdifat keuangan, tentang entitas ekonomi. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional. Kata entitas diartikan sebagai satuan organisasi. Akuntansi yang berkaitan dengan dengan organisasi perusahaan (bisnis) biasanya dikenal dengan akuntansi sektor privat, dan berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga nonprofit dikenal akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik.

Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah daerah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Lingkup akuntansi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang terdiri atas; akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintahan kabupaten atau kota.<sup>8</sup>

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapatdialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan.

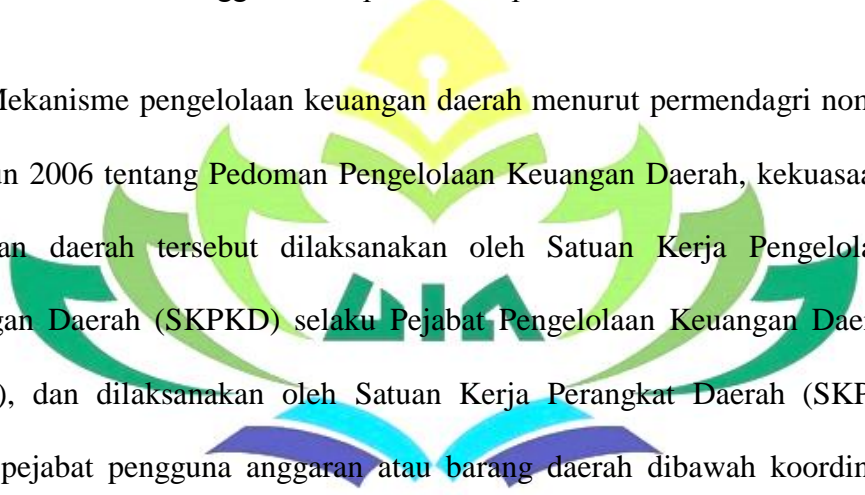
---

<sup>8</sup>Halim, A. *Akuntansi Sector Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007)



Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab. Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa:

“Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah kegiatan yang meliputi serangkaian prosedur mulai dan proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan Pelaporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.”<sup>9</sup>



Mekanisme pengelolaan keuangan daerah menurut permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kekuasaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab.

Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan

---

<sup>9</sup>Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta

keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

#### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

#### 2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

### 3. Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

### 4. Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

### 3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut Harun<sup>10</sup> laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas utama pemerintah kepada wakil rakyat di parlemen atau lembaga-lembaga Negara lain yang berkepentingan serta masyarakat umum. Iklim reformasi

---

<sup>10</sup>Harun.2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

menghendaki akuntabilitas sektor publik yang lebih transparan atau laporan keuangan yang lebih informatif menjadi kebutuhan. Secara spesifik tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan finansial.
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
4. Menyediakan informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya.
5. Menyediakan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Penelitian yang dilakukan Sumarjo<sup>11</sup> mendefinisikan laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang secara formal wajib di publikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen, mengetahui kondisi entitas tersebut.

---

<sup>11</sup>Sumarjo, Hendro, 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.



Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002). Menurut Diamond (2002) penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi dan akuntabilitas

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar pemakai.<sup>12</sup>

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus atau Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, Neraca serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial.<sup>13</sup> Bastian (2006) menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan yang lengkap meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Perubahan Aktiva,

---

<sup>12</sup>Bastian, I. 2006. *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.

<sup>13</sup>Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset. 2009

Laporan Arus Kas, Perhitungan Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan (Hidayat dan Ghozali, 2013).

Analisis kinerja keuangan dilakukan pada dasarnya untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan analisis-analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2013) “analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia”. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan

dalam APBD adalah analisis rasio keuangan. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, derajat kontribusi BUMD, debt service coverage ratio, rasio utang terhadap pendapatan daerah, rasio tingkat pembiayaan SiLPA. Pada penelitian ini rasio yang digunakan adalah derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan.<sup>14</sup>

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.<sup>15</sup>

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya Halim(2007).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Bastian, I. *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. (Yogyakarta: BPFE.2006)

<sup>15</sup>Ibid

<sup>16</sup>Hendriyadi, S. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Antara Tahun 2008-2009*. (Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang)

Sedangkan menurut Mardiasmo<sup>17</sup> pengukuran kinerja keuangan

Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

1. Memperbaiki kinerja pemerintah
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Disamping itu, para pengguna laporan keuangan diberikan pula berbagai macam informasi yang relevan dan berkaitan dengan layanan yang diberikan dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi pemerintah, yang dikelompokkan dalam dua elemen yaitu: elemen di luar kontrol pemerintah seperti kondisi demografi dan lingkungan dan elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secara signifikan seperti pola dan komposisi personalia. Kedua elemen tersebut dapat dianalogikan sebagai elemen-elemen yang terkandung dalam karakteristik pemerintah daerah.

Menurut Syamsi (1986) dalam Halim dan Kusufi (2012)<sup>18</sup>, ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya antara lain:

1. Kemampuan Struktural Organisasinya

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

---

<sup>17</sup>Mardiasmo.(2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

<sup>18</sup>Halim, A dan Kusufi, M.S.2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat



## 2. Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin, dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidamkan oleh daerah.

## 3. Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

## 4. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.<sup>19</sup>

## 5. Analisis Rasio Keuangan

Menurut Mahmudi (2015:9), analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.<sup>20</sup> Menurut Brigham dan Houston (2001: 426), untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan,

---

<sup>19</sup>Halim, A dan Kusufi, M.S. *Akuntansi Keuangan Daerah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2012)

<sup>20</sup>Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya.<sup>21</sup> Laporan keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Akan tetapi nilai riil dari laporan keuangan adalah fakta bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membantu memprediksi laba dan dividen masa depan. Menurut Sugiyono, fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.<sup>22</sup>

Penggunaan analisis keuangan sebagai alat analisis kinerja secara umum telah digunakan oleh lembaga komersial, sedangkan penggunaannya pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Menurut Halim (2007) analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan

---

<sup>21</sup>Brigham, Eugene.F dan Joel F. Houston. 2001. Manajemen Keuangan. Edisi Kedelapan Buku 2. Jakarta: Erlangga

dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### 1. Rasio Kemandirian

Menurut Mahsum dalam Dwijayanti dan Rusherlistyanti<sup>24</sup>, kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berdasarkan formula dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

---

<sup>23</sup>Halim, A. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. (Jakarta:SalembaEmpat, 2007)

<sup>24</sup>Dwijayanti, R dan Rusherlistyanti.2013. *Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah propinsi Se-Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12No.01

Selanjutnya Kecenderungan kemandirian keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan kedua dimensi keuangan ini. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi kemandirian keuangannya, tetapi dengan melihat trend positif dari dimensi kemandirian keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju kemandirian keuangan daerah yang ideal.

Amin dalam Dori Saputra menyatakan bahwa persentase trend digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. Dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Apabila suatu tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data dalam tahun tersebut dinyatakan dengan angka seratus, yang artinya 100% dan data sejenis dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam angka persentase dari data tahun dasar.<sup>25</sup>

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

Tabel 2.1  
Kriteria Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsulatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Mahsum, 2006 dalam Dwijayanti dan Rusherlistyanti, 2013

<sup>25</sup>Dori Saputra, Op.Cit, h.10



## 2. Rasio Efektivitas

Menurut Mahsum dalam Dwijyanti dan Rusherlistyanti, rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.<sup>26</sup>

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasioefektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas.

Selanjutnya Trend efektivitas keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dimensi efektivitas keuangan daerah. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi efektivitas keuangannya, tetapi dengan melihat trend positif dari kedua dimensi keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju efektivitas keuangan daerah yang ideal.

Amin dalam Dori Saputra menyatakan bahwa persentase trend digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. Dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Dwijayanti, R dan Rusherlistyanti.2013. Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah propinsi Se-Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12 No.01

<sup>27</sup>Dori Saputra, "Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat", (Padang: Universitas Negeri Padang, 2014), h.11

Apabila suatu tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data dalam tahun tersebut dinyatakan dengan angka seratus, yang artinya 100% dan data sejenis dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam angka persentase dari data tahun dasar. Analisis trend efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan efektivitas keuangan daerah tersebut. Apabila persentase trend EKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan EKD.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Tabel 2.2  
Kriteria Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kriteria	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	<75

Sumber: Mahmudi, 2010 dalam Dwijayanti dan Ruserlistyanti, 2013

### 3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio perbandingan dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%.

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik.

Rasio efesiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan di kategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk meealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapatdiketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisiensi atau tidak.

Hal ini perlu dlakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan tpenerima pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.<sup>28</sup> (Abdul Halim)

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{realisasi pengeluaran}}{\text{realisasi penerimaan}}$$

Tabel 2.3  
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah Otonomi dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi
Sangat efisien	≤60
Efisien	>60-80

<sup>28</sup>Halim, Abdul. 2007. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Cukup Efisien	>80-90
Kurang Efisien	>90-100
Tidak Efisien	≥100

Sumber: Mahsum, 2006 dalam Dwijayanti dan Rusherlistyanti, 2013

#### 4. Rasio Aktivitas

Rasio keserasian yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pertumbuhan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja pelayanan publik yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.



$$\text{Rasio belanja rutin} = \frac{\text{total belanja rutin}}{\text{total APBD}}$$

$$\text{Rasio belanja pembangunan} = \frac{\text{total belanja pembangunan}}{\text{total APBD}}$$

#### 5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (mahmudi 2010:138). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan



meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu period eke periode berikutnya. Dengan di ketahui pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim 2007:241). Rasio berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan Pemerintah Daerah.<sup>29</sup>

- a. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- b. Pemerintah pusat/propinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemda tersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

$$\text{rasio pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } t_1}{\text{PAD tahun } t-1}$$

## 6. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Kinerja Keuangan Daerah

Lawler dan Porter dalam Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani, Kinerja adalah keberhasilan pencapaian peran yang diperoleh seseorang atas apa yang diperbuatannya.<sup>30</sup> Menurut Fajar Nugroho, Kinerja merupakan pencapaian

<sup>29</sup>Halim, A. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. (Jakarta: SalembaEmpat, 2007)

<sup>30</sup>Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani “Pengaruh Nilai Islam Terhadap Kinerja Kerja”. *Jurnal Mimbar*. Vol 29 No. 3 (2013), h.167

atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi.<sup>31</sup> Dalam pandangan ekonomi Islam, kinerja (hasil kerja) terkait dengan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh seorang individu relevan dengan standar tertentu. Kinerja dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD, dana berimbang serta pendapatan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama beberapa periode anggaran.

Terkait dengan kinerja manusia, Allah mengungkapkannya dalam bentuk pahala dan siksa. Ketika manusia melaksanakan segala perintah Allah maka Allah memberinya pahala. Sebaliknya ketika manusia melanggar aturan yang telah digariskan-Nya, maka Allah akan mengazabnya dengan siksa yang pedih, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran diantaranya Surat Al-Kahfi ayat 87-88 yang berbunyi:

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ  
ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

87. Berkata Dzulkarnain: "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya.

88. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami". (Surat Al-Kahfi ayat 87-88)

Menurut Alorfi dalam Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani, penilaian kerja dalam pandangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan Al-Quran yaitu:

---

<sup>31</sup>Fajar Nugroho, skripsi: Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Diprovinsi Jawa Tengah, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), h. 17

1. Keadilan, kompetensi (QS. An-Nissa ayat 32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَلَّوْا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS. An-Nissa ayat 32)

2. Kejujuran (QS. Al-Maidah ayat 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِّلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Maidah ayat 8)

3. Usaha (QS. An-Najm ayat 39)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : *“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,”* (QS. An-Najm ayat 39)

4. Inisiatif , Pengalaman Kerja (QS. Ar-Raad ayat 11).

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : *”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”* (QS. Ar-Raad ayat 11)

5. Kreativitas individu (QS. Al-Zukhruf ayat 32)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : *”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*(QS. Al-Zukhruf ayat 32)

Sedangkan menurut Sastrohadiwijoyo dalam Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian kinerja yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama serta prakarsa kepemimpinan dari seorang pegawai.<sup>32</sup>

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.<sup>33</sup>

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Araaf ayat 39:

وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأَخْرَلَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

Artinya :” Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan".(QS : Al-Araaf ayat 39)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubudiyah saja, karena pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan kita terima.

Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi, akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi.<sup>34</sup>

## A. Penelitian Terdahulu

<sup>32</sup>Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani, Op.Cit, h.167-168

<sup>33</sup> Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova, Loc.Cit

<sup>34</sup>Rafida. "Analisis Kompetensi Terhadap Kinerja Keuangan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Jambi". Jurnal Nalar Fiqh, Vol 9 No. 1 (2014), h. 10



No	Judul Penelitian/Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten Jembrana tahun 2010-2014. Saputra, C.S., Suwendra W.I., dan Yudiaatmaja. F <sup>35</sup>	Rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, dan rasio efisiensi	Hasil bahwa varian pendapatan yang terjadi di Kabupaten Jembrana pada tahun 2010-2014 dikatakan baik. Namun pada rasio derajat desentralisasi masuk kategori sangat kurang, bahkan pada rasio kemandirian sangat rendah. Meskipun begitu, pada rasio pertumbuhan, varian belanja, dan rasio efisiensi masuk kategori baik.
2	Analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dharmawati, M. K dan Irmadariyani, R <sup>36</sup>	Rasio kinerja keuangan, rasio kemandirian, rasio efektifitas	Hasil bahwa kinerja keuangan pada Kabupaten Banyuwangi sudah dikatakan baik. Hal tersebut terbukti dari hasil analisis perhitungan rasio keuangan. Namun, rasio kemandirian masih tergolong rendah karena tingkat ketergantungan pada pihak eksternal masih cukup tinggi. Dan rasio efektifitas menunjukkan hasil yang baik.
3	Analisis kinerja keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah pemerintah Kota Bukittinggi. Dewi, S. <sup>37</sup>	Rasio kemandirian, , rasio efektifitas,	hasil bahwa tingkat kemandirian kota Bukittinggi masih tergolong rendah, sedangkan dari segi efektifitas anggaran, tergolong tidak efektif dalam penetapan anggaran. Dari segi efisiensi, sudah sangat efisien dalam mengeluarkan biaya untuk memungut PAD
4	Mengukur kinerja	rasio	hasil dari penelitian ini rasio

<sup>35</sup>Saputra, C.S., Suwendra W.I., dan Yudiaatmaja. F.2016. *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten Jembrana tahun 2010-2014*. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha

<sup>36</sup>Dharmawati, M. K dan Irmadariyani, R.2016. *Analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi*. Artikel Ilmiah Mahasiswa

<sup>37</sup>Dewi, S.2015. Analisis kinerja keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah pemerintah Kota Bukittinggi. Jom FEKOM Vol.2 No.2

	pemerintah daerah melalui rasio keuangan daerah. Wakhyudi dan Tarunasari, L.F. <sup>38</sup>	kemandirian, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas	kemandirian dinyatakan rendah karena pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Sedangkan untuk rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan mengalami peningkatan terbukti dengan pemerintah daerah mulai adanya pembangunan sarana dan prasana. Sementara itu rasio efektivitas dan efisiensinya dinyatakan stabil.
5	Perbandingan kinerja keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi daerah. Sulianti dan Ika, S. R. <sup>39</sup>	rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio kemandirian	hasil bahwa rata-rata rasio efisiensi pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah menunjukkan tidak adanya perbedaan. Begitu pula pada rasio efektivitas yang ternyata tidak ada perbedaan tingkat efektivitasnya. Namun, berbeda dengan tingkat kemandirian yang dinyatakan bahwa adanya tingkat perbedaan pada masa sebelum dan sesudah otonomi.
6	Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007. Bisma, I Dewa Gde, dan Hery Susanto. <sup>40</sup>	Rasio kemandirian, , rasio efektifitas	bahwa kinerja pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2003-2007 tidak optimal, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian daerah sangat

<sup>38</sup>Wakhyudi dan Tarunasari, L.F.2013. *Mengukur kinerja pemerintah daerah melalui rasio keuangan daerah*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol.1 No.2

<sup>39</sup>Sulianti dan Ika, S. R.2012. *Perbandingan kinerja keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi daerah*. Efektif: Jurnal Bisnis dan Ekonomi

<sup>40</sup>Bisma, I. G dan Susanto, H. 2010. *Evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003-2007*. Ganec Swara Edisi Khusus vol. 4 No. 3

			kurang. Sedangkan tingkat efektifitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun tingkat efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien
7	Analisis perbandingan kinerja keuangan daerah pemekaran di provinsi Papua. Riani, I. A. P dan Kaluge, D. <sup>41</sup>	Rasio kemandirian, , rasio efektifitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah pemekaran.

## B. Kerangka Berfikir

Karena setiap perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis, maka membuat perusahaan harus mampu mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan persaingan global. Menurut Mathis dan Jackson (2006:382) definisi pengukuran kinerja adalah: “Pengukuran kinerja (performance appraisal) adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Penilaian kinerja juga disebut pemeringkatan karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan kerja, evaluasi kinerja, dan penilaian hasil.” Indikator dalam pengukuran kinerja yang baik menurut Moeheriono (2012:95) dikemukakan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja adalah nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome suatu kegiatan

<sup>41</sup>Riani, I. A. P dan Kaluge, D.2011. Analisis perbandingan kinerja keuangan daerah pemekaran di provinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen Volume.9 Nomor. 3*

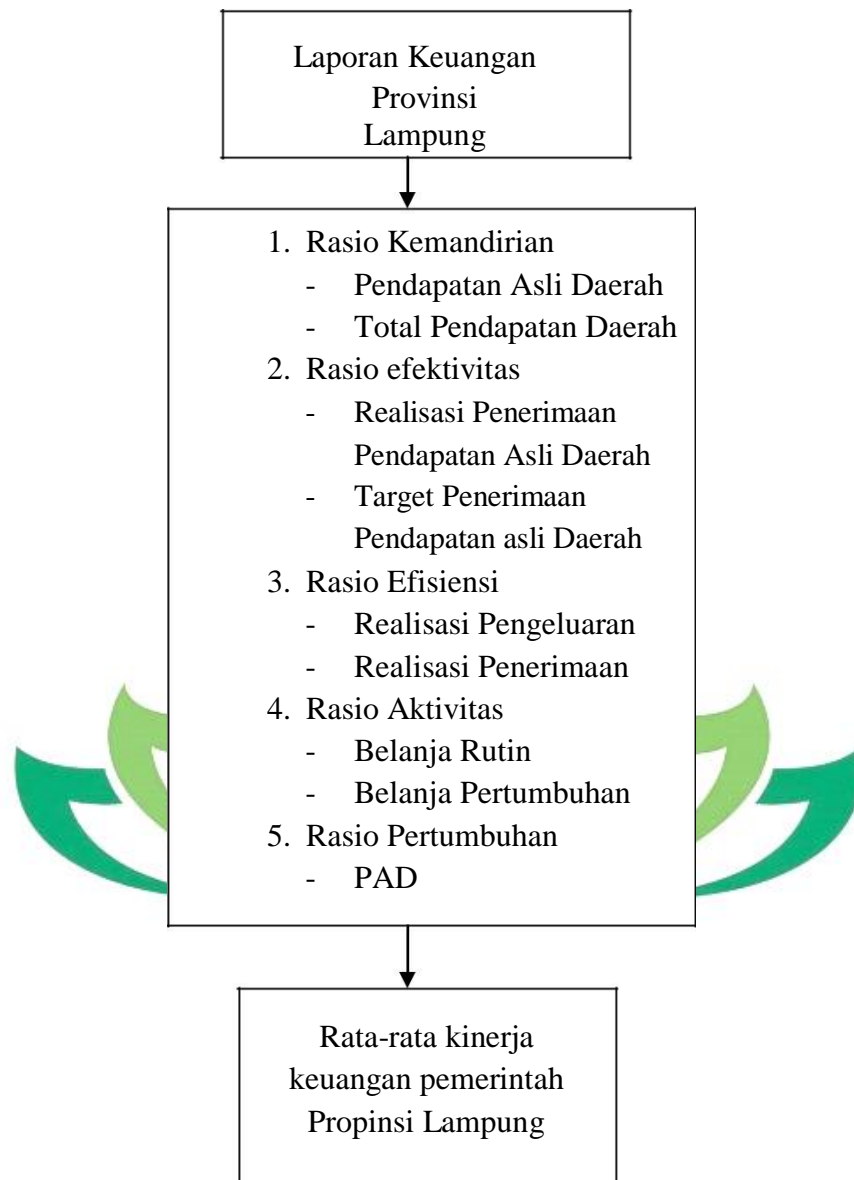
2. Indikator kinerja adalah alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Sehingga, pengukuran kinerja perusahaan tidak hanya terfokus pada ukuran keuangan, yang dalam manajemen tradisional ukuran keuangan inilah yang dengan mudah dilakukan pengukurannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran penelitian ini seperti berikut:



Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir





## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I.2006. *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, I.2009. *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Brigham, Eugene.F dan Joel F. Houston. 2001. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedelapan Buku 2. Jakarta: Erlangga.
- Bisma, I. G dan Susanto, H. 2010. Evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003-2007. *Ganec Swara Edisi Khusus vol. 4 No. 3*
- Dharmawati, M. K dan Irmadariyani, R.2016. Analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*
- Dewi, S.2015. Analisis kinerja keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah pemerintah Kota Bukittinggi. *Jom FEKOM Vol.2 No.2*
- Dwijayanti, R dan Rusherlistyanti.2013. Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah propinsi Se-Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12 No.01*
- Efferin, et.al. (2008). *Metodologi Penelitian Akuntansi, Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, A.2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: SalembaEmpat
- Halim, A dan Kusufi, M.S.2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Harun.2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Hendraryadi, S.2011. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Antara Tahun 2008-2009*. (Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang)
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo.(2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Magdalena, M dan Kurniawan,H.2013. Perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Modus Vol.25 (1): 91-106*

Nordiawan, D.2009. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat

Rahman, N. A., Naukoko ,A., dan Londah, A.2014. Analisis perbandingan kemampuan keuangan daerah di propinsi Sulawesi Utara (studi pada kota Manado dan kota Bitung Tahun 2008-2012). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 14 No.3*

Republik Indonesia. Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta

\_\_\_\_\_. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta

\_\_\_\_\_. UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta

\_\_\_\_\_. PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta

\_\_\_\_\_. PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Jakarta

\_\_\_\_\_. PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Jakarta

\_\_\_\_\_. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta

\_\_\_\_\_. UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta

\_\_\_\_\_. PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta

\_\_\_\_\_. Pemendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta

\_\_\_\_\_. Pemendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta

Riani, I. A. P dan Kaluge, D.2011. Analisis perbandingan kinerja keuangan daerah pemekaran di provinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen Volume. 9 Nomor. 3*

- Saputra, C.S., Suwendra W.I., dan Yudiaatmaja. F.2016. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten Jembrana tahun 2010-2014. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulianti dan Ika,S. R.2012. Perbandingan kinerja keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi daerah. *Efektif: Jurnal Bisnis dan Ekonomi*
- Susantih, H dan Saftiana, Y. Perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*
- Wakhyudi dan Tarunasari, L.F.2013. Mengukur kinerja pemerintah daerah melalui rasio keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol.1 No.2*

